

***Collaborative Governance* dalam Konservasi Penyu di Kampung Baru Lagoi Kabupaten Bintan**

Dwi Anggini¹

angginiowl2@gmail.com

Adji Suradji Muhammad²

suradji@umrah.ac.id

Fitri Kurnianingsih³

fitriacy@gmail.com

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir, ada nilai dasar tersendiri yang melekat pada collaborative governance yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah dan berbagi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 5 tahap dalam teori Ansell dan Gash 2007 dapat terpenuhi atau gagal, selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses collaborative governance di konservasi lagoi indah, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan dalam penerapan proses Collaborative governance. Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya beberapa tahap yang mampu terpenuhi seperti (1). Share understanding, (2). Intermediate outcome, kemudian ada 3 tahap yang gagal terpenuhi oleh proses collaborative governance di konservasi lagoi indah yaitu (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Commitment to process. Dalam tahap yang belum dapat tercapai seperti face to face, trust building dan commitment to process diharapkan para aktor mampu memperbaiki dan memenuhi 3 tahap tersebut, sedangkan untuk 2 tahap yang telah mampu dicapai seperti share understanding dan intermediate outcome diharapkan para aktor mampu mempertahankan dan lebih bertanggung jawab dengan proses collaborative governance.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Stakeholder, Konservasi Penyu.*

ABSTRACT

Collaborative governance is one of the concepts in public policy that has developed in the past few decades, there is a distinctive value inherent in collaborative governance namely consensus orientation, collective leadership, multi-directional communication and sharing of resources. This study aims to find out whether the 5 stages in Ansell and Gash 2007 theory can be fulfilled or failed, besides that this research aims to find out what are the factors of aversion and supporting factors in the collaborative governance process in beautiful conservation. This study uses descriptive research with a qualitative approach. Methods of data collection in the form of interviews conducted to informants who have an interest in applying the Collaborative governance process. Analysis of the data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained from this study are that there are several stages that can be fulfilled such as (1). Share understanding, (2). Intermediate outcome, then there are 3 stages that fail to be fulfilled by the process of collaborative governance in beautiful conservation, namely (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Commitment to process. In the stages that have not been achieved such as face to face, trust building and commitment to process, the actors are expected to be able to improve and fulfill these 3 stages, while for the two stages that have been achieved such as share understanding and intermediate outcomes, the actors are expected to be able to maintain and be more responsible answer with the process of collaborative governance.

Keywords: *Collaborative Governance, Stakeholders, Turtle Conservation*

PENDAHULUAN

Kepulauan Riau merupakan daerah yang dikelilingi oleh lautan dengan garis pesisir yang cukup panjang. Pada umumnya daerah pesisir menyimpan banyak potensi ekosistem laut, baik itu hewan laut, tumbuhan-tumbuhan laut maupun ekosistem lain yang terdapat didalamnya. Keberagaman jenis flora dan fauna ini memiliki nilai besar bagi daerah dan bahkan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan flora dan fauna merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya.

Pentingnya keberadaan flora dan fauna menjadi penyebab pemerintah melakukan berbagai usaha dalam menjaga serta melestarikan ekosistem laut ini. Diantara upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah diantaranya adalah memperkuat dasar hukum dalam pelestariannya yaitu dengan membuat Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya secara teknis terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan konservasi. Konservasi dalam arti umum yaitu merupakan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan, namun pemerintah juga telah merealisasikan dalam wujud nyata berupa pembangunan sarana konservasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bintan seperti konservasi kuda laut di Sekera, konservasi padang lamun yang berada di

Perairan Teluk Bakau, Tanjung Berakit, Mapur dan Tambelan dan Konservasi penyu yang berada di Kampung Baru Lagoi dan Tambelan.

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan konservasi dapat dilihat dari program yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan. DKP Kabupaten Bintan telah melakukan konservasi penyu dengan alasan karena banyaknya ancaman terhadap populasi penyu seperti kegiatan eksploitasi tanpa menjaga kelestariannya. Berikutnya adalah terjadinya perusakan terhadap habitat penyu khususnya tempat betelurnya penyu serta kematian akibat penangkapan tak sengaja yang dilakukan oleh nelayan. Kebiasaan masyarakat lokal mengkonsumsi telur-telur penyu juga menjadi sebab dibentuknya konservasi penyu yang dipusatkan di Kampung Baru Lagoi.

Kampung Baru Lagoi merupakan daerah yang masuk kedalam Desa Sebong Lagoi dan berada di tengah-tengah Kawasan pariwisata (*resort*) Lagoi. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu alasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan mendirikan konservasi penyu di Kampung Baru. Kampung Baru merupakan daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan wilayah konservasi dan untuk mewujudkan Kampung Baru lagoi menjadi daerah wisata. Bahkan dewasa ini pemerintah secara terus-menerus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dalam upaya pengelolaan konservasi penyu.

Dalam melaksanakan layanan publik, saat ini tidak hanya mengandalkan layanan sektor pemerintahan saja, namun sudah merambah pada sektor swasta. Sektor swasta menjadi perhatian

pemerintah mengingat kontribusinya semakin nyata dalam mendukung pembangunan.

Kerjasama dengan melibatkan aktor lain diluar pemerintah atau dalam tataran konsep disebut sebagai *Collaborative Governance* merupakan cara lain dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* maka pemerintah telah melibatkan sektor swasta. Terdapat prinsip dasar dalam menerapkan konsep *Collaborative Governance* diantaranya pelibatan actor lain diluar pemerintah/negara, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, serta bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash 2007 dalam Subarsono (2016:175).

Collaborative Governance secara konseptual dalam Kemitraan tiga sektor, kemitraan tiga sektor pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif *self-interest* dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289), ketiga sektor ini cenderung menyatakan bahwa kerjasama diantara mereka dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerja sama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir *collaborative governance* menjadi salah satu konsep pemerintahan yang banyak diminati oleh para pemangku kepentingan dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas dan kepentingan negara,

collaborative governance muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik (Ansell dan Gash 2007 dalam Subrsono (2016:175). Fokus utama *collaborative governance* mengarah kepada tahapan kebijakan publik. Adapun salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bintan adalah tentang upaya menjaga ekosistem sumber daya hayati melalui konservasi berdasarkan pada undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Berdasarkan pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam konservasi penyu di Kampung Baru Lagoi. Masing-masing *Stakeholder* memiliki peran didalam konservasi penyu di Kampung Baru Lagoi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan KEPRI yang berperan sebagai pendiri area konservasi di Kampung Baru yaitu dengan membangun satu rumah yang terbuat dari kayu sebagai tempat pertemuan. Disamping itu DKP juga membangun 1 buah kandang sebagai tempat penetasan telur penyu, 3 kolam untuk menampung penyu sebelum di lepaskan kembali ke laut.

Sektor swasta yang terlibat yaitu Banyantree Hotel memberikan dana untuk membeli telur-telur penyu dari masyarakat dengan harga Rp.150.000/satu sarang dengan kisaran telur berjumlah 80-150 butir telur. Disamping itu, Banyantree Hotel juga berperan sebagai sponsor dalam *event* wisata resmi yang dilakukan per-tiga

bulan sekali atau tergantung ketersediaan telur penyu setiap tahunnya dengan menghadirkan wisatawan mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Cina, Korea hingga wisatawan mancanegara lainnya.

Masyarakat yang ada dikawasan konservasi berperan sebagai penjaga konservasi dalam hal ini termasuk memperoleh telur penyu dari pemasok yang ada di Sungai Kecil dan Kampung Baru. Tugas masyarakat yang menjaga Kawasan konservasi bertugas melakukan pemberian pakan anak penyu dan memindahkan telur yang telah menetas serta menjaga sampai penyu siap dilepasliarkan ke laut.

Berdasarkan data yang ada dan juga pengakuan Lalu Sabri sebagai Ketua Konservasi Lagoi Indah priode 2013-2017 telah dilepasliarkan ke laut kurang lebih 6000 anak penyu. Pelepasliaran anak penyu ke laut ini menjadi peluang untuk dijual sebagai bagian dari atraksi wisata. Hadirnya atraksi pelepasliaran anak penyu bisa dijadikan event wisata di Kampung Baru.

Proses *collaborative governance* tidak selamanya berjalan dengan baik, terdapat faktor penghambat dan factor pendukung. Setidaknya terdapat lima tahap dalam mewujudkan *collaborative governance*, diantara kelima tahap tersebut dan yaitu *face to face dialog*, *trust building*, *comitment to process*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam program konservasi penyu, maka peneliti ingin mendalami bagaimana proses *collaborative governance* yang terjadi serta faktor apa yang penghambat serta mendukung.

TINJAUAN PUSTAKA

Governance

Kaufman, Kraay, dan Mastruzzi dalam Syafri (2012: 180) mendefenisikan *governance* sebagai “*Governance is the relationship between governments and citizen that enable public policies and program to be formulated, implemented, and evaluated. In the broarder kontext, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization function*”. Maksudnya bahwa pergeseran government ke *governance* dimaksudkan untuk mendemokratisasi administrasi publik. Government menunjuk kepada institusi pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan.

Sementara itu, *governance* menunjuk kepada keterlibatan *Non-Governmental Organization* (NGO), kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat, disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik Ansell & Gash 2007, dalam Subarsono (2016:175).

Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan

kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para *stakeholder*.

Kemitraan

Bovaird dalam Dwiyanto (2011: 263-264) menjelaskan kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat dikembangkan apabila kontrak dilakukan tidak berbasis pada transaksi jual beli, tetapi melalui hubungan kerjasama (*relational*) yang berbasis pada *trust*. Institusi pemerintah berusaha memaksimalkan *revenue* dan meminimalkan biaya dengan menyerahkan pekerjaannya dengan swasta. Sementara sektor swasta berusaha untuk memaksimalkan profit dari keterlibatannya dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam situasi hubungan yang demikian, kerjasama antara pemerintah dan swasta bersifat transaksional dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sink dalam Dwiyanto (2011: 253) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.

Arena Kemitraan

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan institusi diluar pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa arena kemitraan (Dwiyanto 2011: 284-291), yaitu:

1. Kolaborasi antara institusi pemerintah dengan institusi bisnis.

Motivasi utama institusi bisnis malakukan kemitraan pada umumnya adalah untuk mengakses sumberdaya

pemerintah, Melalui kemitraan memungkinkan mereka untuk mengakses sumberdaya yang tersedia diinstitusi pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan publik yang sering terjadi disekitarnya.

2. Kemitraan antara pemerintah dan institusi masyarakat sipil.

Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa pemerintah seringkali memfasilitasi munculnya institusi masyarakat sipil karena pertimbangan tertentu. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut institusi masyarakat sipil atau plat merah adalah "*manufactured civil society*", "*shadow state*", atau "*the third party of government*", yang semuanya menunjuk pada institusi masyarakat sipil yang inisiatif pendiriannya dan pembiayaannya setidaknya pada awalnya berasal dari pemerintah (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 287).

3. Kemitraan tiga sektor

Kemitraan tiga sektor pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif *self-interest* dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289). Ketiga sektor ini cenderung menyatakan bahwa kerjasama diantara mereka dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerja sama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana

peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, hanya akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian.

Sugiyono (2005:11) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif karena dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dengan mencari dan menemukan data secara langsung pada informan dengan cara wawancara yang dianggap berkompeten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam usaha Pemerintah melaksanakan program kerja secara efektif, pemerintah membuat terobosan baru dengan melibatkan *stakeholder* diluar Pemerintah yaitu masyarakat dan swasta. Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007 dalam Subarsono 2016).

Kolaborasi dilakukan guna mencapai tujuan bersama dan melibatkan *stakeholder* diluar pemerintah menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam *collaborative governance* ini ialah sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar

minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

- d. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kelautan dan perikanan.
- e. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi.
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

2. Banyantree Hotel

Byantree Hotel merupakan actor swasta yang memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan hidup biota laut khususnya penyu di Kabupaten Bintan, oleh karena itu Banyantree melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk melestarikan penghidupan penyu dengan bekerjasama dalam bidang konservasi, Banyantree sendiri banyak membantu konservasi lagoi indah dalam bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Byantree Hotel sendiri memiliki dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 1.600 USD/tahun atau sebesar Rp. 22.535.274,-. Dana ini sepenuhnya dikelola sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Untuk saat ini dana tersebut digunakan sudah

mencangkup untuk kegiatan pelatihan masyarakat, uang pengganti telur, pemeliharaan dan lain-lain. Adapun rincian dana yang dikeluarkan Banyantree dalam mengantikan telur penyu dari tahun 2016 hingga 2018 sebagai berikut:

Tabel 1 Dana CSR yang dikeluarkan Banyantree Hotel

No	Tahun	Jumlah telur	Harga
1.	2016	561	600.000
2.	2017	1104	900.000
3.	2018	1027	1.050.000

Sumber; data Banyantree 2019

3. Kelompok Konservasi Penyu Lagoi Indah

Berdasarkan keputusan kepala desa Sebong Lagoi nomor: 09/KPS-DSL/IX/2016 tentang pembentukan LPSTK Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong, maka didirikan kelompok konservasi lagoi indah, yang berada dibawah naungan kelompok LPSTK Amphibi.

Peran kelompok ini adalah untuk menampung, memelihara, serta menjaga penyu-penyu yang ditemukan masyarakat yang kemudian dikonservasi dilokasi konservasi lagoi indah, Masyarakat disini yang juga merupakan anggota konservasi lagoi indah sebagian berperan sebagai pemasok telur penyu yang diperoleh dari pantai-pantai disekitaran kawasan kampung baru lagoi dan sungai kecil.

Kemudian mereka menyerahkan telur penyu ke pihak Banyantree yang ditukar dengan minyak solar yang berguna sebagai bahan bakar mesin genset yang

digunakan sebagai sumber listrik di Kampung Baru Lagoi, dan juga berupa uang tunai sebagai pengganti dari telur penyu yang diserahkan.

4. Akademisi

Dalam aktor kolaborasi sesuai dengan teori Angrawal dan Lemos 2007 dalam Subarsono (2016:176) menjelaskan bahwa definisi *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat dan masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial.

Dengan demikian proses *collaborative governance* bukan hanya melibatkan badan-badan yang berhubungan dengan pemerintahan, swasta dan masyarakat namun juga melibatkan aktor akademisi dimana mereka dituntut selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan intelektual yang dibangun melalui konstruk pemikiran ilmiah yang *naturally*, menjunjung tinggi kondisi obyektivitas dan netralitas. Adapun beberapa akademisi yang pernah berperan dalam konservasi penyu sebagai berikut :

Tabel 2 Aktor akademisi

No	Akademisi	Tahun
1	KKN Kebangsaan UMRAH	2016

2	KKN STAIN SAR	2017
3	Penelitian Dosen UMRAH	2018
4	Pelajar SMA Tunas Bangsa	2018
5	Mahasiswa Kelautan UMRAH	2018

Sumber: data diolah 2016-2018.

Para akademisi dengan pengetahuannya berperan penting dalam konservasi lagoi indah, dengan adanya akademisi lebih memberi pemahaman dan menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan dalam menjalankan proses *collaborative governance* di konservasi lagoi indah.

Dalam melakukan kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait, terdapat proses menuju Collaborative Governance. Tahapan atau proses tersebut merujuk pada konsep Ansel dan Gass (Subarsono 2016:175) yang menggunakan 5 tahap untuk mengukur proses kolaborasi yaitu:

1. *Face to Face Dialog*. *Face to face dialog* atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadinya dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas suatu kepentingan bersama, Awalnya pertemuan pembentukan kelompok konservasi ini terjadi pada hari rabu tanggal 07 september 2016, setelah itu sesuai dengan hasil wawancara sudah tidak ada lagi pertemuan antara pemerintah dan kelompok konservasi Lagoi Indah, dengan Banyantree sendiri pertemuan dilakukan saat diadakan *event* pelepasan tukik, dan saat konservasi Lagoi indah ingin menyerahkan

beberapa telur penyu untuk diserahkan sebagian ke konservasi di Banyantree.

2. *Trust building*. *Trust building* adalah usaha membangun kepercayaan bahwa para pihak memang memiliki niat yang sama dalam upaya mencapai tujuan bersama, *trust building* dapat dimulai dengan membangun komunikasi antara *stakeholder*, Sebagaimana dalam kemitraan diarena lainnya, *trust* selalu menjadi kata kunci dari keberhasilan dalam mengelola kemitraan tiga sektor ini, *Trust* antar pihak dapat menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan kemitraan yang melibatkan institusi yang berbeda budaya dan tradisi. Namun dalam kolaborasi di Konservasi penyu lagoi indah penulis melihat *trust building* masih kurang, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dimana pernyataan dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepri untuk membantu keperluan dan *memonitoring* sudah lama tidak dilakukan, dan dari hasil penelitian lapangan sudah banyak infrastruktur yang sudah tidak layak lagi hal ini menimbulkan kurangnya rasa percaya kelompok konservasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. *Comitment To Process*. *Comitment to Process* merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama bearti setiap pihak memiliki keterkaitannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan

manfaat, kenyataan di lapangan moonitoring sudah tidak lagi dilakukan dari tahun 2016, dan fasilitas-fasilitas konservasi sudah banyak yang rusak. Komitmen kelompok juga kurang menurut penulis dilihat dari hasil penelitian lapangan, pengawasan dan pemeliharaan konservasi hanya dilakukan beberapa anggota kelompok saja. Sesuai dengan teori Kemitraan tiga sektor yaitu pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif *self-interest* dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289), komitmen dalam konservasi hanya ada diawal konservasi didirikan saja, namun komitmen kesungguhan dalam menjalankan konservasi masih belum terpenuhi.

4. *Share understanding*. Dalam konservasi ini yaitu saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa forum ini adalah milik dan tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar kelompok serta menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum ini. Berbagai pengertian dan pemahaman sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dimana pada saat itu Kabupaten Bintan yang memiliki kewenangan dalam konservasi penyu Kampung Baru Lagoi. Dari pihak swasta juga melakukan penyuluhan-penyuluhan baik itu antara staff Banyantree, sekolah-sekolah dan ke masyarakat dan pihak akademisi. dari hasil lapangan peneliti melihat Pemerintah juga menyediakan baleho-

baleho yang memberikan keterangan tentang pentingnya konservasi penyu dan memberikan pemahaman undang-undang tentang konservasi penyu, memberikan pemahaman bahwa penyu termasuk hewan dilindungi dan ada sanksi yang jelas bagi pelanggaran sehingga menurut penulis pemahaman tentang konservasi ini sudah dilakukan dengan baik hal ini berdasarkan dengan hasil penelitian yang penulis teliti.

5. *Intermediate Outcome*. *Intermediate outcome* merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis, Hasil sementara dari kolaborasi DKP Provinsi Kepri, kelompok konservasi Lagoi Indah, dan Banyantree meliputi: kelompok konservasi Lagoi indah, daya tarik terhadap wisatawan. Sesuai dengan teori Bardach dalam Sudarmo (2015: 195) yang mendefenisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan public value ketimbang bekerja sendiri-sendiri, kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sesuai dengan teori diatas peneliti berpendapat bahwa setiap stakeholder yang terlibat mendapatkan intermediate outcome dari kolaborasi konservasi penyu lagoi indah hal ini peneliti simpulkan dari hasil wawancara kepada setiap stakeholder, Event-event yang dibuat menimbulkan keramaian yang mampu mengenalkan Kampung Baru dan dapat menghasilkan biaya untuk keberlangsungan konservasi Lagoi Indah.

Dalam 5 tahap Collaborative Governance yaitu (1). Face to face, (2).

Trust building, (3). comitmen to process, (4). Share understanding (5). Intermediate outcome yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, dalam Subarsono (2016:175). terdapat satu tahap baru untuk menyempurnakan konsep Collaborative Governance. Tahap baru dalam *Collaborative Governance* menurut Muhammad (2018) adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah tahap untuk memastikan tujuan Collaborative Governance dapat tercapai sebagaimana yang dikatakan “melalui tahap “sinkronisasi” menjadi tahap penting agar seluruh perencanaan dapat terkoordinir dengan baik. Jika dilihat letaknya, maka posisi sinkronisasi berada diantara tahap pemahaman bersama (shared understanding) dan hasil antara (*Intermediate outcome*)”

Sesuai dengan pendapatnya diatas dan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dalam kolaborasi di konservasi lagoi indah perlu adanya sinkronisasi antara setiap *stakeholder* yang terlibat, hal ini dikarenakan sebelum melakukan program kerja dan menjalankan program kerja dilapangan setiap *stakeholder* harus memiliki sinkronisasi dalam setiap usulan dan program-program kerja yang akan dijalankan guna mendapatkan tujuan bersama yang diinginkan.

Dengan adanya sinkronisasi dalam tahap kolaborasi yang telah disempurnakan oleh Adji Suradji Muhammad (2018), dapat dilihat dengan adanya sinkronisasi menjadikan masalah-masalah yang mungkin muncul dalam kolaborasi bisa lebih diperkecil dan tujuan besar untuk menjadi lebih baik mampu terlaksana, dalam kolaborasi di konservasi penyu lagoi indah peneliti melihat belum adanya sinkronisasi antara Dinas Kelautan

dan Perikanan dengan *stakeholder* lain, hal ini dapat dilihat dengan tidak tercapainya tahap *face to face* dan *trust building* dalam kolaborasi ini, menurut peneliti tahap sinkronisasi tidak dapat dipenuhi oleh kolaborasi konservasi Lagoi indah karena sudah jarang dilakukannya pengawasan dan koordinasi dalam kolaborasi konservasi Lagoi indah.

Dalam proses *Collaborative Governance* terdapat 2 faktor yaitu penghambat dan faktor pendukung, hasil dari penelitian penulis untuk kedua faktor tersebut ialah :

Faktor Pendukung

1. Sumber daya. Sumber daya yang ada di Kampung Baru Lagoi yang berhubungan dengan penyu adalah adanya pantai yang digunakan penyu sebagai tempat bertelur seperti dipesisir pantai Kampung Baru, Sumber daya ini yang dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber daya dalam melakukan konservasi.
2. Otoritas. Otoritas atau kewenangan adalah faktor yang mendukung dalam kolaborasi, dengan adanya otoritas atau kewenangan yang diberikan pemerintah maka *stakeholder* lain bisa menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-masing baik melalui sebuah prosedur atau pemberian kebebasan dalam berinovasi, didalam konservasi lagoi indah pemerintah memberikan kewenangan dengan kelompok konservasi berupa akta kerjasama dimana tercantum bahwa kelompok konservasi memiliki kebebasan dalam pengelolaan konservasi penyu lagoi indah.

Faktor Penghambat.

Disamping terdapat faktor pendukung dalam *collaborative governance*, terdapat juga faktor penghambat. Diantara factor-

faktor yang menghambat *collaborative governance* antara lain;

1. Kurang Komitmen. Komitmen merupakan faktor penting dalam *Collaborative Governance* ini dimana jika tidak adanya komitmen dari para *stakeholder* maka tidak akan bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi tersebut, dikolaborasi konservasi lagoi indah ini komitmen para *stakeholder* masih kurang sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan baik dan ada beberapa kegiatan yang sudah lama tidak dilakukan seperti pertemuan dan pengawasan terhadap konservasi.
2. Kurangnya Kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam melakukan kerjasama baik itu kerjasama dengan *stakeholder* lain dan kerjasama didalam kelompok itu sendiri, dikonservasi lagoi indah ini dilihat kurangnya kepercayaan kelompok konservasi terhadap pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan konservasi penyu dikarenakan terbengkalainya *monitoring* dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Riau semenjak konservasi diambil alih pada tahun 2016 sampai sekarang.
3. Kurangnya Koordinasi. Kolaborasi yang terjadi dalam konservasi penyu terlihat minimnya koordinasi yang baik dari pihak pemerintah. Terbukti dari kegiatan *monitoring* terakhir pada tahun 2016 hingga saat ini belum terjadi koordinasi kembali. Pemerintah

hanya memberikan bantuan berupa peralatan selam untuk keperluan pembangunan desa wisata semenjak diambil alih oleh pemerintah provinsi.

PENUTUP

Sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Subarsono (2016:175), dan dengan masalah yang ada didalam *Collaborative governance* ini yaitu kurangnya pertemuan *face to face* dan *trust building* antara masyarakat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KEPRI.

Secara umum penulis melihat faktor dalam *Collaborative Governance* sudah mencapai proses dalam menjalankan kolaborasi tetapi akan lebih baik jika disetiap faktor dalam *Collaborative Governance* berjalan dengan baik, setiap aktor seharusnya saling mengingatkan dan memberikan saran dalam proses kolaborasi antara para *stakeholder*.

Secara mendalam menurut penulis dalam proses kolaborasi, seharusnya *trust building* menjadi dasar utama dalam membangun kolaborasi akan lebih baik jika setiap aktor membangun kepercayaan dan konsisten terhadap apa yang telah menjadi tugas setiap aktor. Selain itu proses *face to face* juga perlu dilakukan sesering mungkin guna mampu menyelesaikan masalah yang ada secara musyawarah dan sesuai dengan keinginan setiap pihak. Dengan memenuhi 5 faktor

yang ada didalam *Collaborative Governance* menurut Ansel dan Gash 2007 dalam (Subarsono 2016:175) dan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Adji Suradji Muhammad diharapkan mampu memenuhi kepentingan kelompok dan mampu mewujudkan tujuan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azis, Basyarul.2016. "*Strategi Adaptasi Pengawasan Konservasi Penyus Taman Kili-Kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Tranggalek*". Vol 5,no 2.
- Demartoto, Argyo.2015. *Efektivitas Collaborative Governance dalam Pelayanan Konperhensif Berkesinambungan untuk Menanggulangi HIV/AIDS*. Surakarta: Vol 9, no 4
- Dwiyanto, Agus.2011. *Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Dwiyanto, Agus.2012. *Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Harahap, Minarti. dkk. 2015. *Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyus Pangubahan Kabupaten Sukabumi*. Vol 20. No 39-46.
- Harmawan, Bagus Nuari, dkk. *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Banyuwangi, Vol IV No.1.
- Irawan, Denny. 2017. *Collaborative Governance Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya*. Surabaya, Vol.5 No 3.

- Lukito, Hariyanto Aris Tri, 2016. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta*. Surakarta, Vol. 3 No.1.
- Muhammad, Adji Suradji, dkk. 2017, *Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method*, JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol.21 (2), November 2017, 166-179
- Muhammad, Adji Suradji. 2018. *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Negara di Kepulauan Riau*. PII UMY. Yogyakarta.
- Muqorrobin Ist, Muhammad, 2016. *Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (studi deskriptif pelaksanaan kolaborasi pengendalian penyakit TB/HIV di Kabupaten Blitar)*. Vol 4 No.1.
- Sambodo, Giat Tri, Ulung Pribadi. *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI Yogyakarta*. Yogyakarta, Vol 3 No 1
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan kolaboratif isu-isu kontenporer*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Syafri, Wirwan. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa